

## Masa Depan Guru Indonesia, Dampak Penghapusan Prodi Pendidikan Keguruan

**Patobun**

**Universitas Cokroaminoto Palopo**

patobun@gmail.com

### Abstrak

Wacana penghapusan program studi pendidikan keguruan di perguruan tinggi Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kebijakan rasionalisasi prodi menimbulkan polemik terkait dampaknya terhadap masa depan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap regenerasi tenaga pendidik, kesenjangan akses pendidikan, dan pemenuhan hak dasar pendidikan, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan dan analisis literatur, penelitian ini mengkaji dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa penghapusan prodi keguruan berpotensi memperparah krisis guru, menurunkan mutu pembelajaran, menghambat profesionalisasi calon pendidik, serta memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan terpencil. Kebijakan ini dinilai mengabaikan peran strategis guru sebagai agen perubahan sosial yang tidak dapat diukur semata dengan logika industri. Sebagai alternatif, penelitian merekomendasikan revitalisasi prodi keguruan melalui pembaruan kurikulum berbasis teknologi dan kompetensi abad ke-21, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan sistem sertifikasi berkelanjutan, serta kolaborasi strategis dengan industri. Penguatan ekosistem pendidikan guru merupakan langkah krusial untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Pendidikan keguruan, rasionalisasi prodi, regenerasi guru, kesenjangan pendidikan, revitalisasi kurikulum*

Eduform: Jurnal Ilmu Pendidikan

Vol. 1, No. 2, 2026

ISSN: 3123-9307

Corresponding Email

**Patobun**

patobun@gmail.com

Copyright © 2026

The Author(s)

This article is licensed under  
CC BY-NC-SA 4.0 License



## PENDAHULUAN

Guru adalah fondasi utama dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Namun wacana penghapusan program studi (prodi) pendidikan keguruan di perguruan tinggi menimbulkan polemik besar. Pemerintah beralasan bahwa beberapa prodi dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan, sementara DPR dan masyarakat menilai kebijakan ini mengancam keberlangsungan pendidikan (Sari & Noor, 2022). Guru adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembentuk karakter, penanam nilai, dan penggerak peradaban. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan guru yang berkualitas selalu menjadi faktor penentu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, wacana penghapusan program studi pendidikan keguruan di perguruan tinggi menimbulkan kekhawatiran besar. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang dapat mengganggu regenerasi tenaga pendidik, melemahkan kualitas pendidikan, serta memperlebar kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah (Nurfatimah et al., 2022). Dalam konteks global, banyak negara justru memperkuat sistem pendidikan guru dengan menyesuaikan kurikulum terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan abad ke-21. Indonesia, sebaliknya penghapusan prodi ini menghadapi dilema apakah penghapusan prodi keguruan benar-benar relevan dengan tuntutan zaman, atau justru menjadi ancaman bagi masa depan pendidikan nasional. Pertanyaan ini semakin penting mengingat masih banyak daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang mengalami kekurangan guru, sehingga penghapusan jalur formal pendidikan guru berpotensi memperburuk krisis tenaga pendidik (Nasir & Mujiati, 2020).

Pendahuluan ini menegaskan bahwa isu penghapusan prodi keguruan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas latar belakang kebijakan, dampak terhadap regenerasi guru, implikasi sosial dan pendidikan, serta alternatif solusi yang dapat ditempuh agar masa depan guru Indonesia tetap terjamin (Mansir, 2020). Penghapusan prodi pendidikan keguruan di perguruan tinggi dinilai sebagai langkah mundur yang berbahaya, terutama karena Indonesia masih menghadapi krisis kekurangan guru di daerah terpencil. Kebijakan ini berpotensi melemahkan kualitas pendidikan nasional dan mengancam masa depan regenerasi tenaga pendidik. Penghapusan prodi keguruan bukan hanya mengurangi jumlah calon guru, tetapi juga memperburuk krisis pendidikan di daerah 3T, yang pada akhirnya mengancam pemerataan pendidikan nasional (Mansir, 2020).

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, tantangan globalisasi, revolusi industri, serta transformasi digital menuntut adanya revitalisasi prodi keguruan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Ketaren et al., 2025). Selama ini, profesi guru sering dipandang kurang menarik bagi generasi muda karena keterbatasan kesejahteraan, jalur karier yang tidak jelas, serta minimnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kesejahteraan guru, program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan industri untuk memperkuat daya tarik profesi ini. Selain itu, calon guru harus dibekali dengan adaptabilitas lintas bidang agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan siswa (Risdiyany & Herlambang, 2021). Dengan demikian, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inovator

pendidikan yang mampu menjembatani dunia sekolah dengan perkembangan teknologi dan industri. Revitalisasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih profesional, modern, dan berdaya saing, sehingga profesi guru kembali menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyebut penghapusan prodi pendidikan keguruan sebagai bagian dari rasionalisasi program studi agar lebih relevan dengan perkembangan industri. Penjelasan ini berangkat dari pandangan bahwa perguruan tinggi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis, terutama di era digital dan revolusi industri penjelasan secara meluas (Widiyono & Millati, 2021).

## **METODE**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan studi kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan penghapusan program studi pendidikan keguruan terhadap regenerasi guru, kesenjangan pendidikan, dan hak dasar pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bersifat library research (studi pustaka) yang mengandalkan analisis dokumen dan literatur akademik.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder, yang diperoleh dari: Dokumen Kebijakan Resmi: Peraturan, nota kebijakan, atau pernyataan publik dari Kemendikti Saintek, Kemendikbudristek, dan DPR RI terkait rasionalisasi prodi. Literatur Akademik: Buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan penelitian terdahulu mengenai pendidikan guru, revitalisasi prodi keguruan, dan pendidikan di daerah 3T.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Dokumentasi: Mengidentifikasi, mengunduh, dan mengarsipkan dokumen kebijakan, jurnal, buku, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis Isi (Content Analysis): Menelaah teks dokumen untuk mengidentifikasi gagasan pokok, argumen kebijakan, dampak yang diprediksi, dan rekomendasi alternatif yang diajukan. Pemetaan Referensi: Melakukan penelusuran silang (snowball referencing) dari daftar pustaka dokumen utama untuk memperluas cakupan literatur yang mendukung analisis.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis kualitatif Miles & Huberman yang disesuaikan dengan konteks studi kebijakan:

- a. Reduksi Data: Menyaring dokumen dan literatur yang tidak relevan, kemudian mengutip bagian inti yang berkaitan dengan latar belakang kebijakan, dampak regenerasi guru, implikasi sosial-pendidikan, dan alternatif solusi.
- b. Penyajian Data (Data Display): Mengelompokkan temuan ke dalam matriks tematik sesuai kerangka pembahasan: (a) Rasionalisasi vs. Relevansi

Pendidikan, (b) Dampak terhadap Daerah 3T, (c) Ancaman Hak Pendidikan, (d) Strategi Revitalisasi.

- c. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi: Menyimpulkan temuan secara naratif-analitis, kemudian memverifikasi konsistensi argumen melalui triangulasi sumber (membandingkan perspektif pemerintah, akademisi, dan laporan lembaga pendidikan).

## HASIL

Orientasi Industri Kemendikti Saintek menekankan bahwa banyak prodi di perguruan tinggi dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Rasionalisasi dilakukan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang langsung bisa diserap oleh sektor industri. Efisiensi dan Relevansi Dengan mengurangi prodi yang dianggap “tidak produktif”, pemerintah berharap perguruan tinggi lebih fokus pada bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti teknologi informasi, sains terapan, dan bisnis. Transformasi Kurikulum Rasionalisasi juga dimaksudkan untuk mendorong kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, misalnya integrasi keterampilan digital, inovasi, dan kewirausahaan.

Kontroversi Kebijakan Meski alasan rasionalisasi terdengar logis, kebijakan ini menuai kritik karena pendidikan keguruan memiliki peran strategis yang tidak bisa diukur dengan logika industri semata. Guru bukan sekadar tenaga kerja, melainkan agen perubahan sosial. Implikasi terhadap Pendidikan Nasional Jika prodi keguruan dihapus, regenerasi guru akan terganggu. Hal ini berpotensi memperburuk krisis tenaga pendidik di daerah terpencil dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pendekatan ini dikritik karena pendidikan keguruan tidak bisa disamakan dengan prodi berbasis industri.

### Dampak terhadap Regenerasi Guru

Krisis guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) akan semakin parah jika jalur pendidikan guru dihapus. Krisis Guru akan semakin parah jika jalur pendidikan guru dihapus, karena daerah-daerah tersebut sudah menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang signifikan, dapat kami gambarkan penjekasan secara meluasnya adalah Keterbatasan Akses Daerah 3T sulit menarik tenaga pendidik dari luar karena kondisi geografis, fasilitas terbatas, dan kesejahteraan yang rendah. Regenerasi Terhambat Tanpa prodi keguruan, calon guru kehilangan jalur formal untuk menempuh pendidikan profesi. Akibatnya, jumlah guru baru yang siap ditempatkan di daerah terpencil akan menurun drastis.

Kualitas Pendidikan Menurun Kekurangan guru berimplikasi langsung pada mutu pembelajaran. Anak-anak di daerah 3T berisiko tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kesenjangan Pendidikan Penghapusan prodi keguruan memperlebar jurang ketidakadilan antara sekolah di perkotaan yang relatif mudah mendapatkan guru, dan sekolah di daerah terpencil yang semakin ditinggalkan.

Generasi muda akan kehilangan akses untuk menempuh jalur formal menjadi pendidik jika prodi pendidikan keguruan dihapus, karena jalur ini merupakan pintu utama bagi mereka untuk memperoleh pendidikan akademik, keterampilan pedagogis, dan sertifikasi profesi guru, secara singkat dapat di jelaskan:

- a. Hilangnya Jalur Akademik Tanpa prodi keguruan, calon guru tidak memiliki wadah resmi untuk belajar teori pendidikan, metodologi pengajaran, dan praktik lapangan.

- b. Terhambatnya Profesionalisasi Pendidikan formal keguruan adalah syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi guru. Jika jalur ini ditutup, generasi muda kesulitan memenuhi standar profesi.
- c. Menurunnya Minat Menjadi Guru Ketika akses formal ditutup, profesi guru akan semakin kurang diminati karena jalurnya tidak jelas dan kesejahteraannya belum terjamin.
- d. Ancaman Regenerasi Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus tenaga pendidik akan kehilangan kesempatan, sehingga krisis guru di masa depan semakin nyata.

Kualitas pembelajaran di sekolah akan menurun karena kekurangan tenaga pendidik terlatih. kekurangan guru terlatih akan menyebabkan mutu pembelajaran menurun, prestasi siswa terhambat, dan kesenjangan pendidikan semakin melebar.

- a. Kurangnya Guru Berkualitas Tanpa tenaga pendidik terlatih, siswa tidak mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan standar akademik.
- b. Proses Belajar Tidak Optimal Kekurangan guru membuat rasio guru-siswa tidak seimbang, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif.
- c. Menurunnya Prestasi Siswa Ketidacukupan tenaga pendidik berdampak langsung pada hasil belajar, baik dalam aspek akademik maupun karakter.
- d. Kesenjangan Pendidikan Sekolah di daerah terpencil akan semakin tertinggal dibandingkan sekolah di perkotaan yang relatif lebih mudah mendapatkan guru.

### **Implikasi Sosial dan Pendidikan**

- a. Ketidakadilan pendidikan: Anak-anak di daerah terpencil semakin sulit mendapatkan guru berkualitas, penghapusan prodi keguruan akan memperburuk ketidakadilan pendidikan, karena anak-anak di daerah terpencil semakin kehilangan kesempatan belajar dari guru berkualitas. Dapat kami jelaskan :
- b. Akses Terbatas Sekolah di daerah terpencil sudah menghadapi kesulitan menarik guru karena lokasi jauh, fasilitas minim, dan kesejahteraan rendah.
- c. Kualitas Guru Tidak Merata Tanpa prodi keguruan, jumlah guru terlatih berkurang, sehingga sekolah di desa makin sulit mendapatkan tenaga pendidik yang kompeten.
- d. Kesenjangan Pendidikan Anak-anak di kota tetap bisa belajar dengan guru berkualitas, sementara anak-anak di daerah terpencil semakin tertinggal.
- e. Ancaman Hak Pendidikan Kondisi ini berpotensi melanggar hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara.

Kesenjangan mutu: Sekolah di perkotaan mungkin masih bisa menarik tenaga pendidik alternatif, tetapi sekolah di desa akan tertinggal. penghapusan prodi keguruan akan memperburuk kesenjangan mutu pendidikan, karena sekolah di kota masih bisa bertahan, sementara sekolah di desa semakin kehilangan kesempatan untuk berkembang, dapat kami jelaskan bahwa:

- a. Akses Tenaga Pendidik Sekolah di kota lebih mudah mendapatkan guru, baik lulusan baru maupun tenaga pendidik dari jalur alternatif, karena fasilitas dan kesejahteraan lebih baik.
- b. Keterbatasan Desa Sekolah di desa sulit menarik guru karena kondisi geografis, minimnya sarana, dan rendahnya insentif.

- c. Mutu Pembelajaran Tidak Seimbang Akibatnya, mutu pendidikan di kota tetap terjaga, sedangkan sekolah di desa mengalami penurunan kualitas pembelajaran.
- d. Kesenjangan Nasional Perbedaan ini memperlebar jurang ketidakadilan pendidikan antara kota dan desa, sehingga anak-anak di daerah terpencil semakin tertinggal.
- e. Ancaman terhadap hak dasar pendidikan: Pendidikan adalah hak setiap anak, dan penghapusan prodi keguruan berpotensi melanggar prinsip tersebut, Singkatnya, kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius terhadap hak dasar pendidikan, karena tanpa guru berkualitas, anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar secara layak dan setara.

Hak Anak atas Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Peran Guru Terlatih Guru yang terdidik secara formal adalah kunci untuk menjamin mutu pembelajaran. Jika jalur pendidikan guru ditutup, kualitas tenaga pendidik akan menurun. Ketidakadilan Akses Anak-anak di daerah terpencil akan semakin sulit mendapatkan guru berkualitas, sehingga hak mereka atas pendidikan setara terancam. Pelanggaran Prinsip Dasar Penghapusan prodi keguruan berpotensi melanggar prinsip bahwa pendidikan adalah hak universal, bukan sekadar kebutuhan industri.

Revitalisasi prodi keguruan: Alih-alih dihapus, prodi keguruan perlu diperkuat dengan kurikulum yang relevan dengan era digital, Revitalisasi prodi keguruan berarti memperkuat, bukan menghapus, program studi pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Alih-alih dianggap usang, prodi keguruan justru harus menjadi pusat inovasi dalam mencetak guru yang siap menghadapi tantangan era digital, dapat kami jelaskan solusi terbaik:

- a. Penguatan kurikulum: Kurikulum perlu diperbarui dengan materi berbasis teknologi, literasi digital, dan pedagogi modern.
- b. Integrasi teknologi: Mahasiswa calon guru harus dibekali keterampilan menggunakan platform digital, AI, dan media interaktif dalam pembelajaran.
- c. Kompetensi abad 21: Fokus pada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication agar lulusan mampu mendidik generasi digital-native.
- d. Kolaborasi industri: Kerja sama dengan dunia usaha dan teknologi untuk memastikan lulusan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Peningkatan kesejahteraan guru: Menarik minat generasi muda untuk menjadi guru dengan gaji dan fasilitas yang layak, peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah penting untuk menarik minat generasi muda agar mau berkarier di dunia pendidikan. Guru yang sejahtera akan lebih termotivasi, profesional, dan mampu memberikan kualitas pembelajaran terbaik. Dengan kebijakan ini, guru tidak hanya dipandang sebagai pengajar, tetapi sebagai pilar utama pembangunan bangsa yang layak dihargai secara ekonomi dan social, penjelasannya:

- a. Gaji layak: Menjamin penghasilan yang sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja guru.
- b. Fasilitas memadai: Menyediakan sarana pendukung seperti akses teknologi, ruangkerja nyaman, dan tunjangan kesehatan.
- c. Penghargaan profesi: Memberikan pengakuan sosial dan status yang setara dengan profesi lain.
- d. Daya tarik generasi muda: Dengan kesejahteraan yang terjamin, profesi guru akan lebih diminati oleh lulusan muda berbakat.

Program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan: Memberikan jalur profesional tambahan bagi calon guru, dengan adanya program ini, profesi guru menjadi lebih menarik, terjamin, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di era digital, secara terperinci:

- a. Standar kompetensi: Sertifikasi menegaskan bahwa guru memenuhi kualifikasi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.
- b. Pengakuan profesi: Memberikan legitimasi dan status sosial yang lebih tinggi bagi guru sebagai tenaga profesional.
- c. Peningkatan kualitas: Guru bersertifikat lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran modern.
- d. Jalur karier: Membuka peluang kenaikan pangkat, tunjangan, dan kesempatan pelatihan lanjutan.
- e. Motivasi generasi muda: Sertifikasi membuat profesi guru lebih menarik karena jelas jalur pengembangan dan penghargaan.

Kolaborasi dengan industri: Mengintegrasikan keterampilan teknologi dan soft skills agar lulusan keguruan lebih adaptif, Kolaborasi dengan industri adalah strategi penting untuk menjadikan lulusan keguruan lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja modern. Dengan bekerja sama dengan sektor industri, prodi keguruan dapat mengintegrasikan keterampilan teknologi dan soft skills yang relevan, rinciannya secara singkat:

- a. Integrasi teknologi: Mahasiswa calon guru dilatih menggunakan perangkat digital, aplikasi pembelajaran, dan AI agar siap menghadapi era digital.
- b. Soft skills: Melatih komunikasi, kepemimpinan, problem solving, dan kolaborasi agar guru mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif.
- c. Kerja sama industri: Menghadirkan program magang, workshop, atau pelatihan bersama perusahaan teknologi dan pendidikan.
- d. Adaptabilitas lulusan: Membekali calon guru dengan keterampilan lintas bidang sehingga lebih fleksibel menghadapi perubahan kurikulum dan kebutuhan siswa. Adaptabilitas lulusan adalah kemampuan calon guru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan siswa melalui keterampilan lintas bidang. Hal ini menjadikan mereka lebih fleksibel, kreatif, dan siap menghadapi dinamika pendidikan modern. Rinciannya bahwa :
- e. Keterampilan lintas bidang: Membekali calon guru dengan pengetahuan teknologi, manajemen kelas, dan literasi digital.
- f. Fleksibilitas kurikulum: Guru mampu menyesuaikan metode mengajar sesuai perubahan kebijakan pendidikan.
- g. Pemahaman kebutuhan siswa: Membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan potensi siswa.
- h. Kesiapan menghadapi era digital: Lulusan lebih siap menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran.

## SIMPULAN

Masa depan guru Indonesia sangat bergantung pada kebijakan pendidikan tinggi. Penghapusan prodi keguruan bukanlah solusi, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan pendidikan nasional. Pemerintah seharusnya fokus pada penguatan kualitas prodi keguruan, kesejahteraan guru, serta pemerataan akses pendidikan agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tetap terwujud. Revitalisasi prodi keguruan merupakan langkah strategis untuk memastikan profesi

guru tetap relevan di era digital. Upaya ini mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, serta program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan industri dan pengembangan adaptabilitas lulusan menjadi kunci agar calon guru mampu menghadapi perubahan kurikulum dan kebutuhan siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, profesi guru tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (2009). *Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, O. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Imam Wahyudi. (2012). *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakatya.
- Kemendikbud RI. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketaren, D. M. B., Nazila, R., & Sari, C. K. (2025). Revitalisasi Pendidikan Guru Untuk Menjawab Tantangan Abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2), 51–56. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.291>
- Mansir, F. (2020). Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 293–293. <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i2.829>
- Mundial, G. B., Unidas, F. de P. de las N., Desarrollo, P. de las N. U. para el, & Unidas, N. (2016). *Education 2030: Incheon declaration and framework for action: towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*. <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/118764>
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansur. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, N., & Mujiati, M. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik (Guru) di Rural Area. *Didaktis Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i1.4383>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- OECD. (2019). *Teaching and Learning International Survey (TALIS)*. OECD Publishing.
- Risdiany, H., & Herlambang, Y. T. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 817–823. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.434>
- Sari, E. L. I. P., & Noor, A. F. (2022). Kebijakan Pembelajaran Yang Merdeka: Dukungan Dan Kritik. *Educativo Jurnal Pendidikan*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.56248/educativo.viii.7>
- Sudarwan, Danim. (2010). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanto, S., & Jihad, A. (2013). *Menjadi guru profesional : strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global*. [http://opac.iainpekalongan.ac.id/perpus/index.php?p=show\\_detail&id=150258&keywords=](http://opac.iainpekalongan.ac.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=150258&keywords=)
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan : pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. [https://slims.radenfatah.ac.id/fpps/new/index.php?p=show\\_detail&id=6608](https://slims.radenfatah.ac.id/fpps/new/index.php?p=show_detail&id=6608)
- Widiyono, A., & Millati, I. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.63>